

Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat

Khairil Ihsan¹, Tengku Khofifah Khairunisa², Ibnu Zulkhoir³

Ahmad Nasir Hasibuan⁴, Fitriani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ihsankhairil21@gmail.com¹

ABSTRACT

One of the duties and functions of DPRD members, namely members of the district DPRD, includes the obligation to absorb and collect constituent aspirations through regular working visits, accommodate and follow up on public aspirations and complaints, and provide moral and political accountability to constituents in their constituency. The research used in this study is a qualitative approach. As for what is meant by qualitative research, namely research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects holistically, and by means of descriptions in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various scientific methods. This research resulted that the members of the North Sumatra DPRD members of the Golongan Karya faction in fighting for the aspirations of the people were carried out by members of the parliament as the people's representatives in the legislature using several methods. The role of DPRD members is to oversee the running of government and to be a connector of people's aspirations for the government. The role of DPRD members in fighting for people's aspirations has been carried out optimally.

Keywords : *dprd, recess, community aspirations.*

ABSTRAK

Salah satu tupoksi dari anggota DPRD yaitu anggota DPRD kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menghasilkan bahwa Peranan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh anggota dewan selaku keterwakilan rakyat di lembaga legislatif memiliki beberapa metode. Peranan anggota DPRD merupakan pengawas dari jalannya pemerintahan serta menjadi penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Peranan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan secara optimal.

Kata kunci : *dprd, reses, aspirasi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Negeri Indonesia ialah negeri yang menganut sistem kerakyatan, yang dimana negeri ini mengadopsi rancangan Trias Politika ataupun diucap penjabatan kewenangan yang antara lain Badan Legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD), Administrator (Kepala negara, Delegasi Kepala negara Kementrian) serta Yudikatif (Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi). Tiap badan mempunyai kewajiban serta guna tiap- tiap cocok dengan rancangan Trias Politika. Rancangan ini dalam kehidupan berpolitik, ialah cara- cara buat berpolitik dengan cara kerakyatan dengan impian jalanya penguasa negeri tidak menyimpang, bebas dari penggelapan rezim oleh satu badan, serta hendak menimbulkan metode check and balances (silih mengkoreksi serta silih menyeimbangi) (Utama, n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menarangkan kalau DPRD ialah badan perwakilan orang wilayah yang berada selaku faktor eksekutor Rezim Wilayah. Sebaliknya peranan badan DPRD antara lain ialah meresap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti harapan warga. Peranan ini dengan cara khusus diatur dalam Hukum No 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD kalau badan DPRD kabupaten antara lain memiliki peranan meresap serta menghimpun harapan konstituen lewat kunjungan kegiatan dengan cara teratur, menampung serta menindaklanjuti harapan serta aduan warga, serta membagikan pertanggungjawaban dengan cara akhlak serta politis pada konstituen di wilayah pemilihannya (Siahaan et al., 2021).

DPRD selaku badan perwakilan rakyat mempunyai 3 andil berarti. Awal, selaku agen perumus skedul untuk warga yang diwakilinya. Kedua, DPRD berfungsi selaku badan yang mengemban tujuan pengurusan bentrokan dalam warga. Ketiga, DPRD merupakan pengemban kedudukan integratif dalam masyarakatnya. Kedudukan perwakilan orang yang menempel pada DPRD lazim dimaknai selaku kedudukan keperantaraan. DPRD tidak cuma jadi perantara yang menjembatani penguasa (administrator) dengan rakyatnya, tetapi pula menjembatani ketegangan dari bermacam bagian dalam warga yang silih mengupayakan kepentingannya (Dprd et al., 2009).

Anggota DPRD dalam perwakilannya mempunyai wilayah penentuan tiap- tiap ataupun yang disingkat dengan dapil. Wilayah penentuan dipecah bersumber pada jangkauan besar ataupun lingkup area khusus yang sudah diresmikan. Oleh sebab itu, tiap badan DPRD mempunyai tanggung jawab ataupun peranan buat melaksanakan suatu ikatan ketertarikan dengan warga khususnya warga yang terdapat di wilayah pemilihannya. Warga itu diucap dengan sebutan "konstituen". Konstituen ataupun pemilih ialah donatur amanat pada pihak yang diberi tanggung jawab, warga yang wajib diwakili ataupun golongan target yang wajib dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini amat bermanfaat untuk badan DPRD ataupun warga, lewat sistem ini bisa teridentifikasi lebih nyata mengenai siapa menggantikan siapa serta dari wilayah mana. Para delegasi orang bisa mengetahui kalau mereka tersaring sebab menggantikan orang

serta wilayah khusus. Kebalikannya, para pemilih pula bisa mengenali siapa yang menggantikan mereka serta daerahnya (Bangsa et al., 2020).

Realisasi dari pengumpulan kebijaksanaan yang bersumber pada kebutuhan semua orang ialah bayangan dari kesertaan orang, begitu juga yang diajarkan dalam filosofi kerakyatan. Bagi Arbi Sanit(1985: 203) filosofi kerakyatan mengarahkan kalau badan warga mengutip bagian ataupun ikut serta dalam cara serta determinasi kebijaksanaan penguasa. Para delegasi orang melaksanakan aksi ataupun berperan atas julukan orang buat merumuskan dan menyudahi kebijaksanaan yang menyangkut bermacam pandangan kehidupan orang. Buat dapatmengetahui dengan cara betul harapan ataupun kemauan yang bertumbuh ditengah- tengah warga, hingga para delegasi orang wajib bisa meresap harapan warga dengan bagus (Cetak et al., 2019).

Berartinya penerapan absorpsi harapan warga mendesak para delegasi orang buat melangsungkan kunjungan dengan cara teratur ke wilayah pemilihannya tiap- tiap supaya bisa mengenali permasalahan- permasalahan yang dialami oleh konstituen. Kunjungan kegiatan itu sudah ditetapkan dalam aturan teratur DPRD ialah pada era reses. Era reses ialah bagian dari era sidang serta dilaksanakan sangat lama 6 hari kegiatan. Pada era ini badan DPRD dengan cara perseorangan mendatangi wilayah pemilihannya untuk meresap harapan warga. Setelah itu sehabis melakukan aktivitas tiap badan DPRD harus membuat informasi tercatat ataupun hasil penerapan tugasnya pada era reses serta di informasikan pada arahan DPRD dalam rapat sempurna.

Kehadiran bagian tidak hanya berperan selaku delegasi partai politik di DPRD, pula berperan selaku bagian terkecil dalam bentuk badan rezim dengan melaksanakan guna legislasi untuk orang banyak. Bagian wajib melindungi situasi kegiatan yang bagus supaya profesi yang dicoba wajib berguna serta cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan. Oleh sebab itu, bagian pula wajib digariskan dengan cara pas supaya bisa melaksanakan guna serta tugasnya. Jumlah wewenang Bagian seluruhnya diserahkan oleh Peraturan Aturan Teratur Badan Perwakilan Orang(DPRD), dituturkan dalam Peraturan Aturan Teratur Badan Perwakilan Orang kalau tujuan dibentuknya Bagian merupakan buat memaksimalkan serta Mengenang perihal di atas, tidak bisa disangkal kalau partai politik pula mempunyai berperan yang penting kala beliau tiba buat memajukan cara pendemokrasian di negeri khusus. Mulailah dengan berlatih mengenai Partai Kalangan Buatan(GOLKAR). Tidak hanya itu, tujuan partai ini merupakan buat berbicara, menjaga, menjaga, serta menciptakan kesempurnaan sesuatu Negeri Republik Indonesia dan menciptakanangan-angan NKRI (Dprd et al., 2009).

Dari latar belakang diatas menunjukkan peran fraksi partai belum sepenuhnya mampu berperan secara penuh dalam menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas dengan judul **Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat.**

TINJAUAN PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam filosofi negara diketahui terdapatnya “Trias politica” yang dipublikasikan oleh Montesquie, ialah terdapatnya pembelahan kewenangan dalam sesuatu negeri. Kewenangan negeri yang diketahui ialah administrator, kewenangan legislatif serta kewenangan yudikatif. Iswara(yati 2020). DPRD selaku badan legislatif wilayah mempunyai peran yang sebanding serta ialah kawan kerja penguasa. Penafsiran kawan serta cocok dimaksud mempunyai hak serta peranan yang serupa namun berlawanan dengan statment kalau kepala wilayah bertanggung jawab pada DPRD.

Lembaga ini diketahui selaku parlemen, sebab tutur" parle" berarti ucapan, maksudnya mereka wajib menyuarakan batin batin orang, maksudnya dikala mereka melafalkan serta mengagresikan kebutuhan orang, mereka wajib membahas dalam konferensi parlemen Sebab itu, DPR diberi amanat buat mempersoalkan penguasa. tiap area, apakah itu provinsi ataupun kota ataupun kota, begitu juga mestinya. Akhirnya, agen administrator penguasa mempunyai daya buat membuat ketetapan, sebaliknya agen legislatif mempunyai keahlian buat mengganti hukum buat wilayah tanpa tubuh legislatif. Di tingkatan provinsi serta wilayah, fungsi- fungsi itu dicoba oleh pembantu gubernur(masyarakat dahulu) serta pembantu bupati(dahulu kewedanaan), sebaliknya di tingkatan nasional dicoba oleh pembantu kota. Sebab itu, tidak hanya DPRD, tiap penentuan biasa mempunyai 3 tempat pemungutan suara yang wajib diisi (Cetak et al., 2019).

Pengertian Fraksi

Istilah fraksi ialah salah satu sebutan yang dipakai buat political group atau party group yang terdapat diparlemen. Sebutan lain tidak hanya bagian, pula kerap dipakai faction, clup, group, serta serupanya. Dalam penafsiran bagian tercantum arti terdapatnya“ bagian patuh partai, partai wajib dihormati. Anggota- anggota di dalam partai wajib mengantarkan keadaan yang jadi kebijaksanaan partai, mereka yang tidak mengindahkan kebijakan partai rawan letaknya. Jika patuh partai yang hendak dipegang hingga kehadiran bagian itu berarti.” Di dalam kamus politik yang ditulis oleh B. N marbun kalau tutur bagian alih bahasa selaku golongan orang yang memiliki serta memperjuangkan sesuatu gerakan politik dalam parlemen ataupun dewan- dewan perwakilan. Pula di alih bahasa selaku bagian kecil; bagian. Diketahui semenjak rentang waktu DPR sedangkan tahun 1950 (Sobirin, 2014).

Fraksi ialah representatif dari partai politik selaku perlengkapan keseluruhan Badan Perwakilan Orang Wilayah yang mempunyai kewajiban serta kedudukan amat memastikan. Bagian membagikan tindakan politik dalam aturan pemakaian hak menanya serta mengantarkan opini bersumber pada determinasi konferensi serta perundingan. Perkara penghapusan bagian dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nampak dari kehadiran bagian di angka amat berarti sebab perpanjangan dari partai politik. Bila

bagian di lenyap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga hendak nampak kalau kedudukan partai politik hendak tidak nyata. Kebutuhan warga tidak hendak teralirkan lewat bagian namun apabila bagian dihapuskan hendak Terlihat kekuasaan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggantikan wilayah penentuan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari tipe informasinya pendekatan riset yang dipakai dalam riset ini merupakan pendekatan kualitatif. Ada pula yang diartikan dengan riset kualitatif ialah riset yang berarti buat menguasai kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh poin riset dengan cara holistik, serta dengan metode cerita dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara objektif (Moleong, 2007: 6).

Ada pula tipe pendekatan riset ini merupakan deskriptif. Riset deskriptif ialah riset yang berupaya buat mengatakan jalan keluar permasalahan yang terdapat saat ini bersumber pada data- data. Tipe riset deskriptif kualitatif yang dipakai pada riset ini dimaksudkan buat mendapatkan data hal gimana andil badan DPRD provinsi Sumatera Utara spesialnya bagian kalangan buatan dalam memperjuangkan harapan warga.

Riset ini memakai poin riset yang dimana Poin riset ialah pangkal informasi yang dimintai datanya cocok dengan permasalahan riset. Ada pula yang diartikan pangkal informasi dalam riset merupakan poin dari mana informasi didapat (Suharsimi Arikunto, 2002: 107). Buat menemukan informasi yang pas hingga butuh didetetapkan informan yang mempunyai kompetensi serta cocok dengan keinginan informasi (purposive). Riset ini bermaksud buat mengetahui serta menganalisa sikap konsumtif pada membeli- beli online yang terjalin pada mahasiswa. Informan selaku poin riset ialah informan yang telah didetetapkan dengan patokan khusus yang telah diresmikan oleh regu periset.

Serta dalam metode pengumpulan informasi dalam riset ialah, dengan melaksanakan metode tanya jawab serta pula pemantauan. Yang dimana, dalam tata cara atau metode tanya jawab yang dipakai ialah tata cara tanya jawab ini dipakai buat mendapatkan penjelasan data ataupun uraian sekeliling kasus dengan cara mendalam alhasil didapat informasi yang cermat serta terpercaya sebab didapat dengan cara langsung tanpa perantara. Dengan tata cara tanya jawab tidak tertata.

Dalam tata cara pemantauan, yang dimana tata cara pemantauan ini ialah metode ataupun pendekatan buat memperoleh informasi pokok dengan metode mengubah langsung obyek informasinya. Bagi Sugiyono (2016: 310) mengklasifikasikan pemantauan jadi pemantauan ikut serta, pemantauan berterus terang serta tersamar, serta pemantauan yang tidak bersistem. Riset ini tercantum ke dalam pemantauan partisipatif, di mana periset ikut serta dengan aktivitas tiap hari orang lagi dicermati ataupun yang dipakai selaku pangkal informasi riset. Bagi Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016: 311) sembari melaksanakan observasi periset turut melaksanakan apa yang digarap oleh pangkal informasi serta turut merasakan senang gelisah nya dengan

pemantauan partisi pisan ini hingga informasi yang didapat hendak lebih komplit runding sebab periset nampakserta mencermati sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari proses pengumpulan data melalui teknik wawancara, membuahkan hasil penelitian bahwa DPRD Kota Medan Sumatera Utara merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah di Kota Medan yang memiliki tiga fungsi, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan, Fraksi partai golongan karya (Golkar) sendiri merupakan sebuah kelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan rakyat yang memiliki pandangan politik yang sejalan dengan visi dan misi Partai Golongan Karya.

Nama Fraksi	Partai Politik	Ketua	Jumlah Anggota
PDI Perjuangan	 PDI Perjuangan	Mangapul Purba (Sumut 10)	19
Gerindra	 Gerindra	Ari Wibowo (Sumut 6)	15
Golkar	 Golkar	Dhody Thahir (Sumut 5) ⁽¹⁾⁽²⁾	15
NasDem	 NasDem	Tuahman Fransiscus Purba (Sumut 2)	12
PKS	 PKS	Jumadi (Sumut 1) ⁽¹⁾⁽²⁾	11
Demokrat	 Demokrat	Armyan Simatupang (Sumut 5)	9
PAN	 PAN	Hendra Cipta (Sumut 3)	8
Hanura	 Hanura	Rusdi Lubis (Sumut 10)	6
Nusantara	 PPP  PKB  Perindo	Zeira Salim Ritonga (Sumut 6) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	5

Gambar 1. Tabel Fraksi Pada DPRD Sumatera Utara

Dilihat dari table diatas, dapat diketahui bahwa fraksi Golongan Karya (Golkar) memiliki esensi yang cukup baik dan tinggi keberadaannya dalam lembaga DPRD Sumatera Utara. Dimana, fraksi Golongan Karya dalam lembaga DPRD Sumatera Utara menempati posisi ketiga dengan jumlah anggota DPRD terbanyak setelah fraksi gerindra. Fraksi yang diketuain oleh Dhody Thahir ini memiliki esensi yang berpengaruh dan signifikan dalam kelembagaan DPRD Sumatera Utara.

Dalam penampungan dan pengupayaan aspirasi masyarakat, DPRD butuh melaksanakan reses. Masa reses ialah era dimana badan DPRD melaksanakan kunjungan ke konstituen yang dimana dalam perihal ini badan badan melaksanakan aktivitas diluar konferensi, paling utama di luar bangunan DPRD. Misalnya buat melaksanakan kunjungan kegiatan, salah satunya kegiatan dengan turun ke warga, bagus yang dicoba badan dengan cara perseorangan ataupun dengan cara beregu. Perihal ini menafsirkan kalau reses dicoba dalam kerangka badan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam perihal legilasi, penganggaran, serta pengawasan.

Reses jadi salah satu peranan yang wajib dilaksanakan oleh badan DPRD begitu juga sudah tertera dalam Hukum MD3. Reses sendiri dilaksanakan selaku usaha menampung tiap harapan dari warga. Penerapan reses dilaksanakan dengan cara teratur di wilayah penentuan dari masing masing badan DPRD. Hasil dari penerapan reses diajukan pada ulasan konferensi sempurna DPRD. Tiap harapan yang ditampung dalam era reses dilaksanakan untuk tingkatkan mutu dari kemampuan badan DPRD dalam menciptakan keselamatan orang, kesamarataan sosial, dan menciptakan kedudukan dari DPRD mengembangkan check and balances antara DPRD pastinya dengan penguasa wilayah. Reses yang dilaksanakan oleh tiap badan DPRD bermaksud buat bisa meresap dan sanggup menindaklanjuti bermacam harapan yang di informasikan oleh konstituen. Tidak hanya itu, cara reses dilaksanakan buat mengikuti aduan dari warga selaku bentuk dari pertanggungjawaban bagus akhlak ataupun politis kepada konstituen pada wilayah pemilihannya. Perihal itu jadi bentuk dari perwakilan orang paling utama dalam pemerintahan.



Gambar 1. Proses Rapat DPRD Sumatera Utara

Aspirasi masyarakat pada biasanya amat membutuhkan perbaikan- perbaikan prasarana. Seluruh wilayah yang datangi dikala reses, berambisi supaya perhitungan pembangunan dapat lekas berjalan tercantum harapan dari seluruh badan badan supaya dapat menolong pula warga. DPRD Sumatera Utara berusaha supaya harapan warga yang dijarah lewat program reses itu bisa terakomodir dalam bentuk badan APBD. Alhasil perihal ini tidak memunculkan perbincangan antara DPRD serta Penguasa Wilayah dikala cara ulasan perhitungan. Alasan perbincangan tidak pergi dari keadaan yang bertabiat prinsipil. Apalagi bagi Lule“ DPRD bagus dengan cara individu ataupun kelembagaan senantiasa menegaskan pada Regu Perhitungan Penguasa Wilayah(TAPD) supaya tidak melaksanakan pemangkasan kepada perhitungan yang dikira membagikan agunan keselamatan kepada warga paling utama perhitungan pemberdayaan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, hal-hal non fisik juga sangat penting. Pembangunan non fisik jadi salah satu usaha membangkitkan warga dalam cara penyembuhan zona sosial ataupun ekonomi pada sesudah satu tahun era endemi covid- 19 kemudian. Salah satu perihal yang jadi fokus dari reses badan DPRD Sumatera Utara ialah mau mendesak warga buat melaksanakan usaha- usaha yang karakternya mandiri, semacam pembuatan koperasi, pemberian modal upaya serta serupanya. Usaha badan DPRD dalam menangkap harapan warga pada dikala turun langsung ke wilayah pemilihannya, diharapkan pada dikala konferensi sanggup mewujudkan aspirasi itu.

Namun, dalam setiap regulasi dan perubahan, pastinya harus ada andil pada kedua sisinya, Selain itu, masyarakat Sumatera Utara diharapkan dapat berperan aktif menyampaikan tuntutan atau saran terhadap setiap masalah yang ada di lingkungan masyarakat kepada anggota DPRD Sumatera Utara agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga tindak lanjut dari berbagai aspirasi hasilnya dapat diketahui dan diukur oleh masyarakat guna pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Peranan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh anggota dewan selaku keterwakilan rakyat di lembaga legislatif memiliki beberapa metode. Peranan anggota DPRD merupakan pengawas dari jalannya pemerintahan serta menjadi penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Peranan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan secara optimal. Dapat dilihat secara umum dari upaya-upaya yang telah dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara, Fraksi Golongan dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut baik secara formal dalam arti penyerapan aspirasi masyarakat dengan reses dan kunjungan kerja maupun secara informal dimana dengan insiatif anggota DPRD dengan kunjungan kerja kelapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwadud Lule, I. L. (2017). DINAMIKA INTERAKSI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI PULAU MOROTAI (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif). 1–20.
- Beriansyah, A., & Mutiarin, D. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0038>
- Hendriyanto, R. (2020). Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Rese Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. 15.
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Bangsa, K., Mengupayakan, D., & Masyarakat, A. (2020). 1) 2) 1,2). 5, 30–40.
- Cetak, I., Online, I., & Volume, D. (2019). *No Title*. 20(1), 58–71.
- Dprd, S., Tomohon, K., Rizky, B., & Rindengan, I. (2009). *No Title*. 32.
- Siahaan, F. E., Lumbangaol, S. T. P., & Siagian, C. (2021). *Peranan perguruan tinggi dalam mendukung kinerja dprd kota pematangsiantar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih efektif 1*. 1(1), 110–112.
- Sobirin, A. (2014). Organisasi dan Perilaku Organisasi. *Budaya Organisasi, Pengertian, Makna Dan Aplikasinya*, 1–72.
- Utama, R. A. (n.d.). *Peranan DPRD Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Di Kota Bandung*. 63–68.